

EXCLUSIVE NEWS

BERKATA DENGAN FAKTA



**Pemkab Sanggau Tidak Lagi Menganggarkan Gaji
Honorar Mulai Juli 2025**

**Wakil Bupati Sanggau Sidak Ketersediaan Obat
dan Stabilitas Harga**

Perusahaan Pelat Merah jadi Sarang Korupsi

ISSN 3089-3275

PIMPINAN REDAKSI

TOMI, S.Pd.,M.E.

REDAKTUR & EDITOR

WERDA NINGSIH, S.Pd

LAY OUT

NAJWA AT. THOMIMY

MEDIA

DAYANG SURTILAH

ADMIN

MOHAMMAD SULTHAN

KEPALA KONTRIBUTOR

FATIHAH AT. THOMIMY

KONTRIBUTOR

UMI WAWA

ABI AHMAD

JIHAN ANNISA

Volume 2 Nomor 03, Maret 2025

EXCLUSIVE NEWS

BERKATA DENGAN FAKTA



<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Diterbitkan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
Maret 2025

Oleh:

CV. Tom'S Book Publishing

Jl. Padat Karya No. 12 Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas – Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat – Indonesia

Contact Person +62 85752078799

Email: tomsbooks.publishing@gmail.com

Website : <http://tomsbook.co.id>

EXCLUSIVE NEWS

VOLUME 2 NOMOR 03, MARET 2025

DAFTAR ISI

1. Pemkab Sanggau Tidak Lagi Menganggarkan Gaji Honorer Mulai Juli 2025 3
2. Dasawarsa Courant Pre-Launching Buku Goesti Soeloeng Lelanang..... 4 – 6
3. 21,8 Miliar, Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga yang Tersangka Korupsi 7 – 9
4. Dua Dirut Pertamina Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah..... 10 – 11
5. Sekjen DPR Indra Iskandar jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Rumah Dinas 12 – 13
6. Perusahaan Pelat Merah jadi Sarang Korupsi 14 – 15
7. Potensi Kerugian Negara Rp1,2 Triliun Akibat Proyek PLTU Kalbar Mangkrak 16 – 18
8. Satgas Pangan Polri Tetapkan Kepala Cabang Jadi Tersangka Dalam Kasus MinyakKita..... 19 – 23
9. 3 Koruptor Bank Kalbar jadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat..... 24 – 26
10. Kapolres Ngada Cabuli 3 Anak di Bawah Umur dan Jual Video Pornonya Ke Situs Australia 27 – 31
11. Kasus Pencabulan Dan Penyalahgunaan Narkotika oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja Menambah Sejarah Kelam Sistem Rekrutmen Polri 32 – 34
12. Sanggau, Kalimantan Barat Tetap Aman dan Kondusif 35 – 36
13. Pemuda Pancasila, Tomas, Toga beserta Elemen Masyarakat Bagikan Takjil 37 – 38
14. Buka Bersama Forkopimda Sanggau, Kodim 1204/Sgu dan Polres Sanggau..... 39 – 40
15. Wakil Bupati Sanggau Sidak Ketersediaan Obat dan Stabilitas Harga..... 41 – 42

PENGANTAR REDAKSI



Salam Literasi,

Para Pembaca Media Exclusive News, kembali Penerbit CV. Tom'S Book Publishing menerbitkan Media Exclusive News untuk Volume 2 Nomor 03, Maret 2025. Terbitnya Media Exclusive News ini sebagai upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, melalui bacaan yang kritis sesuai pakta.

Selain hadir dalam bentuk cetakan juga dapat dibaca melalui website <https://exclusivenews.tomsbook.co.id>. Ketersediaan melalui online ini sebagai wujud kesiapan CV. Tom'S Book Publishing terhadap kemajuan teknologi, serta mengakomodir minat masyarakat yang memerlukan bacaan secara online.

Semoga kehadiran Media Exclusive News ini dapat diterima oleh masyarakat dan bermanfaat, serta diharapkan bisa menjadi media penyampai informasi yang kritis sesuai pakta.

Demikian, *Salam Literasi*.

Sanggau, Maret 2025

Dewan Redaksi

Pemkab Sanggau Tidak Lagi Menganggarkan Gaji Honorer Mulai Juli 2025



Sanggau, Exclusive News--- Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan tidak lagi menganggarkan gaji honorer, dan itu berlaku mulai Juli 2025.

“Pemda sudah tidak bisa menganggarkan lagi, sampai Juni situ jak kan,” kata Bupati Sanggau Yohanes Ontot kepada wartawan.

Anggaran yang mencapai milyaran untuk membayar honorer membuat Pemda kewalahan.

“Anggarannya bukan seratus dua ratus juga, tapi milyaran. Mereka tidak lagi dianggarkan untuk masa waktu transisi hingga mereka diangkat PPPK nanti,” ujar Ontot.

Meski demikian, Ontot mengungkapkan masih adanya kemungkinan dianggarkan tergantung kebijakan Pemerintah Pusat.

“Kecuali ada kebijakan Pemerintah Pusat mengintruksikan Bupati/Walikota mungkin bisa, tapi kalau untuk hari ini anggaran kita sudah sangat terbatas,” katanya.***

Dasawarsa Courant Pre-Launching Buku Goesti Soeloeng Lelanang



Tomí, S.Pd.,M.E., penulis buku Goesti Soeloeng Lelanang menyampaikan materinya di acara Pre-Launching, pada Sabtu, 1 Maret 2025

Kubu Raya, Dasawarsa Courant--- Dalam rangka peluncuran buku Goesti Soeloeng Lelanang yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2025, Media Dasawarsa Courant berkerjasama dengan CV. Tom'S Book Publishing menggelar Pre-Launching di kantor Redaksi Dasawarsa Courant di Komplek Mega Griya, Jalan Raya Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 16.00 – 18.00, diikuti oleh pegiat Kolektor Media Lawas (Komal) dari berbagai daerah.

Goesti Soeloeng Lelanang merupakan pejuang Kalimantan Barat berasal dari daerah Ngabang. Gusti Sulung Lelanang merupakan salah seorang yang diasingkan ke Boven Digoel karena keberaniannya melawan penjajah Hindia Belanda. Sehingga untuk mengingat perjuangannya didirikanlah monumen "Tugu Digulis". Tugu berbentuk

bambu runcing yang berjumlah 11 buah menandakan bahwa ada 11 pejuang dari Kalimantan Barat yang pernah diasingkan ke Boven Digoel.

Goesti Soeloeng Lelanang memiliki kekerabatan dengan Kerajaan Landak dari ayahnya, Pangeran Laksamana Gusti Mahmud. Sebagai keturunan bangsawan, ia dapat mengenyam pendidikan di Hollandsche Indische School (HIS) Jatinegara, Batavia. Sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar itu setara dengan Sekolah Dasar yang dapat ditempuh 6-7 tahun.

Perjuangan Gusti Sulung Lelanang berakhir ketika Jepang masuk ke Kalimantan Barat. Semua sekolah yang pernah ia rintis ditutup kecuali beberapa sekolah yang menurut Jepang boleh tetap beroperasi. Akhir hayat Gusti Sulung Lelanang terungkap pada pemberitaan Koran Borneo Shinbun 28 Juni 1944, ia bersama ribuan kaum cendekiawan di Kalimantan Barat ini dibunuh oleh Jepang.

Pada acara Pre-Launching tersebut, Tomi, S.Pd.,M.E., sebagai penulis buku Goesti Soeloeng Lelanang menyampaikan dalam paparan materinya, bahwa buku Goesti Soeloeng Lelanang ini banyak memberikan informasi tentang kondisi dan situasi Kalimantan Barat pada masa kolonial Belanda, khususnya sejarah lahirnya pers di Kalimantan Barat.

“Buku ini mengulas tentang permulaan lahirnya pers di Kalimantan Barat. Selain itu juga terdapat beberapa tulisan Goesti Soeloeng Lelanang tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, yang bisa menjadi rujukan untuk penulisan sejarah”, demikian Tomi menjelaskan.

Acara Pre-Launching yang bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadhan tahun 2025 itu, dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama dan Sholat Maghrib berjamaah. Setelah itu dilanjutkan diskusi tentang rencana peluncuran buku Goesti Soeloeng Lelanang bulan depan. Kemudian ditutup dengan sholat Isya dan Tarawih berjamaah.

Diakhir acara, Tomiyang ditemui media ini menyampaikan harapannya agar dengan terbitnya buku Goesti Soeloeng Lelanang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pegiat sejarah tentang Kalimantan Barat. Karena cukup banyak tulisan-tulisan yang di

publikasikan pada masa itu yang menjelaskan tentang sejarah di Kalimantan Barat.

“Saya berharap, buku Goesti Soeloeng Lelanang ini bisa menjadi salah satu referensi bagi pegiat dan penulis sejarah dalam menulis sejarah tentang Kalimantan Barat. Khususnya tentang sejarah hubungan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Begitu juga buku Haji Rais Abdoerracman yang telah siap untuk di Launching, yang sebelumnya telah direncanakan untuk di Launching bulan Januari 2025 lalu, tetapi terkendala karena pihak penerbitnya mendahulukan persiapan Launching media Exclusive News. Semoga saja bulan April nanti kedua buku tersebut bisa di Launching secara bersamaan”, ujar Tomi. (Red)

21,8 Miliar, Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga yang Tersangka Korupsi



Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah bagian negara, Senin (24/2/2025).

Jakarta, Exclusive News--- Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menjadi sorotan publik. Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah besaran gaji dan tunjangan yang diterima para direksi, termasuk posisi Direktur Utama di anak perusahaan Pertamina ini.

Struktur Gaji dan Tunjangan Direksi Pertamina Patra Niaga

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi BUMN terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan dan Fasilitas
3. Tantiem atau Insentif Kinerja

Berapa Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga?

Gaji Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga ditentukan berdasarkan pedoman internal Pertamina. Besaran gaji Direktur lainnya dalam struktur direksi ditetapkan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji pokok, direksi juga memperoleh berbagai tunjangan, antara lain:

1. Tunjangan Hari Raya (THR): Maksimal satu kali honorarium per bulan dalam setahun.
2. Tunjangan Perumahan: Sebesar 85% dari tunjangan perumahan Direktur Utama.
3. Asuransi Purna Jabatan: Premi ditanggung perusahaan dengan batas maksimal 25% dari gaji tahunan.
4. Fasilitas Kendaraan Dinas: Direksi mendapatkan kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya.
5. Asuransi Kesehatan: Mencakup pertanggungangan atau penggantian biaya pengobatan.
6. Bantuan Hukum: Jika diperlukan dalam kapasitas jabatan.

Estimasi Gaji dan Kompensasi Direksi

Berdasarkan Laporan Keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, termasuk Dewan Direksi dan Komisaris, mencapai US\$ 19,1 juta atau sekitar Rp 312 miliar. Dengan jumlah tujuh anggota Dewan Komisaris dan tujuh anggota Dewan Direksi, setiap individu diperkirakan menerima kompensasi sekitar US\$ 1,36 juta atau setara Rp 21,8 miliar per tahun (dengan asumsi kurs Rp 16.000 per USD).

Besaran ini menempatkan posisi Direktur Utama di anak usaha Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN.

Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Riva Siahaan

Meskipun menerima gaji dan tunjangan yang sangat besar, Riva Siahaan ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan

korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Selain Riva, terdapat enam tersangka lainnya, yakni:

1. SDS – Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
2. YF – Pejabat di PT Pertamina International Shipping
3. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
4. MKAN – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
5. DW – Komisararis PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jengjala Maritim
6. GRJ – Komisararis PT Jengjala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, serta bukti dokumen yang sah. Ketujuh tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sikap Pertamina Terhadap Kasus Ini

Menanggapi kasus ini, PT Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Djoko Santoso.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan di BUMN. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat besar, penyalahgunaan wewenang menjadi isu serius yang harus ditindak secara tegas. Publik tentu berharap agar proses hukum berjalan transparan dan keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya. *(Red)*

Dua Dirut Pertamina Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah



Dua Dirut Pertamina Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Jakarta, Exclusive News--- Kejaksaan Agung RI menetapkan dua direktur utama Subholding Pertamina sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kedua pejabat Pertamina tersebut adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, dan Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping, YF.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan, Abdul Qohar mengatakan, selain itu ada juga tersangka lainnya merupakan pegawai Pertamina dan dari pihak swasta.

Diketahui, Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Internasional Shipping adalah dua entitas yang merupakan Sub Holding dari Pertamina.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 59/FD2/FD.2/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024. Berdasarkan

perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara terdapat serangkaian tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti yang cukup,” ujarnya pada wartawan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, penetapan tersangka 7 orang di kasus tersebut dilakukan pasca ekspose kasus dan tercukupinya alat bukti. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti lainnya.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka,” tuturnya.

7 Tersangka Dugaan Korupsi

Adapun para tersangka tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga.
2. SDS selaku Direktur Fitstop and Product Optimisation PT Kilang Pertamina Internasional.
3. YF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping.
4. AP selaku VP Pit Stop PT Kilang Pertamina Internasional.
5. MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigation Khatulistiwa.
6. DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, yang mana dia menjadi sebagai Komisaris di 2 perusahaan sekaligus.
7. DRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim sekaligus menjabat sebagai Dirut PT Orbit Terminal Merak. (Red)

Sekjen DPR Indra Iskandar jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Rumah Dinas



Sekjen DPR Indra Iskandar jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Jakarta, Exclusive News--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali bersuara soal status tersangka terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar. Indra ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR Tahun Anggaran 2020 bersama enam orang lainnya.

“Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (Pengguna Anggaran), dan kawan-kawan,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyo, melalui keterangannya, pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Selanjutnya, Setyo menjelaskan bahwa tim penyidik KPK belum menahan Indra dan tersangka lainnya karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP,” ujar Setyo.

Indra ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan (Spindik) Nomor: Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024, tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Nomor: B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 24 Januari 2024. Diketahui, Indra diduga terlibat rasuah dalam kasus pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI.

Selain Indra, enam orang lain yang turut dinilai terlibat oleh KPK dan berstatus tersangka yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI, Hippi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta Edwin Budiman.

Sebab status hukumnya, Indra pernah menggugatnya melalui sidang praperadilan pada Mei 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun saat sidang perdana digelar, Indra memutuskan mencabut gugatan tersebut.

“Hakim tunggal Ahmad Samuar SH MH telah membacakan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pencabutan permohonan praperadilan,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, nilai proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020 mencapai sekitar Rp120 miliar. KPK menduga kasus ini telah merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Setyo juga menyebut, tertundanya penanganan kasus Indra Iskandar disebabkan kasus lain yang lebih mendesak. Namun dia berjanji, KPK akan menyelesaikan semua kasus yang sudah menetapkan status tersangka kepada para pihak.

“Ini mungkin masalah pembagian perkara di satgas saja. Mungkin karena satgasnya, saya barusan cek juga tadi satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya delay saja, pasti ada penyelesaian,” Setyo menandasi.***

Perusahaan Pelat Merah jadi Sarang Korupsi

**KLASEMEN TERUPDATE
LIGA KORUPSI INDONESIA**

	TEAMS	PTS
▲ 1	 PERTAMINA	968,5 T
▼ 2	 PT TIMAH	300 T
3	 BLBI	138 T
4	 DUTA PALMA	78 T
5	 PT TPPI	37 T
6	 PT ASABRI	22 T
7	 PT JIWASRAYA	17 T
8	 KEMENSOS	17 T
9	 SAWIT CPO	12 T
10	 GARUDA INDONESIA	9 T
11	 BTS KOMINFO	8 T
12	 BANK CENTURY	7 T

Klasemen Liga Korupsi Indonesia

Jakarta, Exclusive News--- Seakan tak habis-habis, kasus demi kasus mega korupsi yang melibatkan perusahaan pelat merah terus menguak.

Sebelumnya, dua lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga tengah menyelidiki kasus besar yang melibatkan perusahaan pelat merah.

Kejaksaan Agung sedang menyidik kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang disinyalir merugikan negara hingga Rp193 triliun pada periode 2018-2023.

Angka tersebut membuat dugaan korupsi PT. Pertamina menjadi kasus korupsi terbesar kedua menggeser kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dengan nilai fantastis Rp193 triliun ini menjadi sorotan tajam. Angka tersebut bukan hanya sekadar kerugian negara, tetapi juga menjadi simbol betapa lemahnya pengawasan dan manajemen di perusahaan energi terbesar Indonesia ini.

Sementara, KPK juga telah mengumumkan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyeret lima tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun.

Selain itu, KPK juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191,64 miliar, ditambah kerugian bunga Rp28,78 miliar.

Penyidikan juga mengarah pada kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta keterlibatan pihak-pihak lain yang diuntungkan dalam kasus tersebut.

Kasus Pertamina dan PLN hanyalah puncak gunung es. Berdasarkan penelusuran, masih banyak skandal korupsi besar lainnya yang mencerminkan betapa sistemik dan mengakarnya praktik ini di Indonesia.

Sebut saja kasus PT Timah dengan dugaan kerugian Rp300 triliun. Jumlah kerugian negara itu dihitung salah satunya berdasarkan kerugian ekologis senilai Rp271 triliun.

Kemudian skandal Jiwasraya dan Asabri yang mengguncang sektor asuransi negara, serta kasus BTS Kominfo yang memperlambat pemerataan infrastruktur digital.

Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang harus menanggung dampak langsung berupa layanan yang buruk dan harga yang tidak terjangkau. (Red)

Potensi Kerugian Negara Rp1,2 Triliun Akibat Proyek PLTU Kalbar Mangkrak



Potensi Kerugian Negara Rp1,2 Triliun Akibat Proyek PLTU Kalbar Mangkrak

Pontianak, Exclusive News--- Belum selesai urusan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, publik kini kembali dikejutkan dengan dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Setidaknya ada tiga kasus yang kini tengah diselidiki aparat hukum, salah satunya terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Barat.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT PLN Persero.

Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Arief Adiharsa, mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus masih tahap awal atau masih tahap penyelidikan.

“Masih tahap penyelidikan, ya. Belum bisa saya konfirmasikan sekarang. Masih dalam penyelidikan tahap awal,” ungkap Brigjen Arief dilansir dari website tipidkorpri.

Saat ini polisi sudah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PLN Pusat pada 3 Maret 2025 yang lalu.

Seperti diketahui, pada kasus PLTU 1 Kalbar ini terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak 2016. Imbas dari kasus proyek mangkrak ini, potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

Dilansir dari sumber yang sama pada 8 November 2024, Brigjen Arief bilang kasus dugaan korupsi ini bermula saat proyek PLTU 1 Kalbar berkapasitas 2x50 MW ini menggunakan anggaran dari PT PLN (Persero) dimenangkan oleh konsorsium KSO BRN melalui proses lelang pada 2008. Namun belakangan diketahui bahwa KSO BRN tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis.

Pada 11 Juni 2009, kontrak senilai USD 80 juta atau setara Rp1,2 triliun dengan kurs saat ini ditandatangani oleh RR selaku Dirut PT BRN mewakili konsorsium BRN dengan FM selaku Dirut PT PLN.

Setelah memenangkan lelang, KSO BRN mengalihkan seluruh pekerjaan kepada dua perusahaan asal Tiongkok, PT PI dan QJPSE. Namun, pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut gagal mencapai target, sehingga sejak 2016 proyek pembangunan PLTU tersebut dinyatakan mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Selain kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Polri dikabarkan juga mengusut dua dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang melibatkan perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Namun, Brigjen Arief belum bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai konstruksi dugaan tindak pidana korupsi, maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

“Belum bisa saya konfirmasi sekarang,” ujarnya.

Adapun pihak PLN sendiri hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait penyelidikan ini.

Manajer Hubungan Media PLN, Leo Manurung, serta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, belum memberikan pernyataan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Kortastipidkor Polri.

Munculnya dugaan kasus korupsi PLN ini sontak membuat heboh media sosial. Warganet tak henti menanggapi kabar ini dengan gaduh di media sosial.

Khususnya pada postingan terkait kasus korupsi PT PLN di akun @pembasmi.kehaluan.reall yang tengah ramai jadi perbincangan tersebut.

“Bayar listrik tiap bulan, tapi katanya PLN selalu rugi. Ini kah sebabnya?” tulis warganet.

“Yang tiap tahun koar-koar terus merugi, padahal dikorupsi berjamaah. Sekali lagi yang jadi korban adalah rakyat,” imbuah yang lain.

“Program Januari-Februari diskon 50 persen ternyata belum sebanding sama Rp1,2T. Terusin aja itu programnya pak,” tandas lainnya.

Adapun Komisaris Independen PT PLN (Persero), Andi Arief juga angkat suara terkait kabar ini.

“Tipikor Polri dikabarkan sedang penyelidikan kasus di PT PLN,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/3/2025).

Walau demikian, kasus itu belum terang. Belum diketahui berapa kerugiannya.

“Meski belum tahu persis kasusnya apa, tahun berapa, dan berapa besar kerugian negaranya, pihak PLN pasti kooperatif,” terangnya.

Namun ia yakin dengan PLN. Mengingat perusahaan plat merah itu salah satu yang terbaik berapa tahun terakhir.

“PT PLN termasuk kinerja terbaik beberapa tahun terakhir, untung cukup besar, pelayanan meningkat,” pungkasnya.***

Satgas Pangan Polri Tetapkan Kepala Cabang Jadi Tersangka Dalam Kasus MinyakKita



Satgas Pangan Polri Tetapkan Kepala Cabang Jadi Tersangka Dalam Kasus MinyakKita

Jakarta, Exclusive News--- Pada Sabtu 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman---melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, ia menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi MinyakKita.

Kemudian pada Selasa, 11 Maret 2025, di Jakarta, Kasatgas Pangan DIRTIPIDEKSUS Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf didampingi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Brigjen Kurniawan Affandi, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan keterangan pers terkait produk minyak goreng MinyakKita yang isinya tidak sesuai kemasan di Lobby Bareskrim Polri.

Satu tersangka ditetapkan dalam kasus minyak goreng MinyakKita yang tidak sesuai takaran dengan yang tertera pada label kemasan. Hal ini disampaikan Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus

(Dittipideksus) Bareskrim Polri selaku Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf.

“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI,” kata Helfi.

Peran AWI, kata dia, adalah sebagai kepala cabang sekaligus pengelola PT AYA Rasa Nabati yang bertugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek, salah satunya MinyaKita.

Dipaparkan oleh Brigjen Pol Helfi bahwa tertangkapnya AWI berawal dari pengeledahan yang dilakukan pihaknya pada PT Artha Eka Global Asia. Pengeledahan itu dilakukan berdasarkan hasil inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 Maret 2025, yang menemukan bahwa minyak yang diproduksi perusahaan tersebut tidak sesuai takaran.

Kemudian, pada Minggu, 9 Maret 2025, penyidik mendatangi Jalan Tole Iskandar Nomor 75, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan lokasi perusahaan tersebut. Ternyata perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi PT AYA Rasa Nabati.

Dalam pengeledahan, penyidik mendapati mesin yang digunakan untuk mengemas minyak yang sudah diatur ke ukuran 802 mililiter dan 760 mililiter.

“Jadi, dia setting manual berapa (ukuran, red.) yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut,” ucapnya.

Kemudian, penyidik melaksanakan pengecekan manual dan menemukan bahwa ukuran minyak yang berada di dalam kemasan berbeda dengan ukuran yang tertera di kemasan.

Lebih lanjut, diungkapkan oleh Brigjen Pol. Helfi bahwa AWI telah menjalankan usaha tersebut sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi minyak goreng sebanyak 400 sampai 800 karton sehari dalam bentuk kemasan maupun pouch.

“Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek, salah satunya MinyaKita,” katanya.

Diketahui pula bahwa tersangka AWI mendapatkan bahan baku minyak goreng curah dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram.

Selain itu, tersangka juga mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol dan kemasan pouch seharga Rp680 per biji.

“Dan ada juga yang kemasan untuk dua liter itu Rp870 per pcs. Itu untuk pouch-nya atau tempatnya,” imbuhnya.

Kronologis Kasus Minyakita

Pada Sabtu 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Dalam sidak tersebut, ia menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi Minyakita.

Amran mengungkapkan bahwa tiga perusahaan diduga melakukan kecurangan, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Salah satu pelanggaran utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian volume minyak dalam kemasan.

Minyakita yang seharusnya memiliki isi 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml.

Tak hanya itu, harga jualnya pun melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Di pasaran, Minyakita dijual dengan harga Rp18.000 per liter, jauh di atas ketentuan resmi.

“Ini kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Amran.

Ia menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran harus segera ditutup dan izinnya dicabut.

“Kami tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Temuan ini mengingatkan kembali pada kasus serupa yang terjadi pada Januari 2025.

Saat itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia di Tangerang, yang diduga melakukan berbagai pelanggaran dalam produksi dan distribusi Minyakita.

PT Navyta Nabati Indonesia diketahui melanggar sejumlah aturan, antara lain:

1. Tidak memiliki izin edar dari BPOM untuk Minyakita.
2. Tidak memiliki izin resmi untuk aktivitas pengemasan.
3. Memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendag.
4. Menggunakan minyak goreng non-DMO untuk produksi Minyakita.
5. Mengemas Minyakita dengan volume kurang dari 1 liter.

Dalam operasi tersebut, Kementerian Perdagangan memasang garis tertib niaga terhadap 7.800 botol Minyakita dan 275 kardus minyak kemasan ukuran 1 liter.

Budi Santoso mengungkapkan bahwa pelanggaran ini menjadi salah satu faktor utama mengapa harga Minyakita tidak mengalami penurunan di pasaran.

“Kami temukan ada penyimpangan yang tidak sesuai aturan. Ini salah satu penyebab kenapa harga Minyakita tidak turun,” ujar Budi pada 24 Januari 2025.

Jika terbukti bersalah, perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran ini dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari pencabutan izin usaha hingga hukuman pidana sesuai dengan UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen.

Minyakita Melenceng dari Tujuannya

Minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyakita pertama kali diluncurkan pada 6 Juli 2022. Produk ini awalnya diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng saat itu sekaligus memastikan ketersediaan minyak dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Saat pertama dirilis, Minyakita dipatok dengan harga Rp14.000 per liter. Namun, belum genap satu tahun sejak peluncurannya, harga minyak goreng ini mulai melonjak hingga Rp15.000–Rp16.500 per liter di berbagai daerah, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pada dasarnya, adanya Minyakita merupakan inisiatif dari Menteri Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan, yang bertujuan mengemas minyak goreng curah agar distribusinya lebih mudah dan lebih cepat terserap di pasaran.

Awalnya, produk ini diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro untuk membantu menekan harga pangan.

Namun, pada Maret 2023, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa distribusi Minyakita justru tidak tepat sasaran.

Produk ini banyak ditemukan di rak-rak ritel modern dan dijual secara luas di marketplace, yang seharusnya lebih banyak diakses oleh konsumen minyak premium.

Kondisi ini membuat ketersediaan Minyakita di pasar tradisional berkurang drastis.

“Tentu dengan kejadian itu di pasar tradisional menjadi berkurang,” ujar Zulkifli dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Rabu 15 Maret 2023 lalu.

Selain itu, ada dugaan bahwa beberapa pihak melakukan praktik curang dengan mengemas ulang minyak goreng premium menggunakan label Minyakita.

Zulkifli menjelaskan bahwa kualitas Minyakita yang beredar seharusnya setara dengan minyak curah, namun yang dijual justru minyak premium yang telah dikemas ulang.

“Minyakita ini mestinya minyak curah,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa produsen minyak goreng premium mengalami penurunan produksi hingga 80 persen akibat praktik ini.***

3 Koruptor Bank Kalbar jadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat



3 Koruptor Bank Kalbar yang menjadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yakni : Drs. Samsiar Ismail, M.M., Drs. Sudirman HMY, M.M. dan M. Faridhan, S.E.,M.M.

Pontianak, Exclusive News--- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tengah mencari keberadaan tiga orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pada Bank Kalbar Tahun Anggaran 2015.

Kami mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan mereka untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang. Segala informasi yang diberikan akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum.

Hubungi:

Instagram: [@pidsus.kejatialbar](https://www.instagram.com/pidsus.kejatialbar)

085766229269 (Arif) / 081292521398 (Leni)

Mari bersama wujudkan keadilan dan bersihkan negeri dari tindak pidana korupsi! Mohon bantu sebarakan informasi ini agar dapat segera ditemukan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Untuk diketahui, sebanyak 3 (tiga) orang Koruptor saat ini tengah di buruh masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada Jumat 14 Maret 2025.

Sebanyak 3 (tiga) orang Koruptor yang menjadi DPO tersebut terlibat dalam kasus yang sama yakni terkait perkara Pengadaan tanah Bank Kalbar (PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat) pada tahun 2015 yang di Mark Up sebesar kurang lebih Rp 30 Miliar oleh para Pelaku.

Sebelum masuk DPO, sebagai mana diketahui sebelumnya, pihak Kejaksaan Kalimantan Barat telah melakukan pengumuman pemanggilan terhadap ketiga Koruptor Bank Kalbar itu. Berikut ketiga Koruptor Bank Kalbar yang menjadi DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yakni:

1. Samsiar Ismail, M.M.
2. Sudirman HMY, M.M.
3. Faridhan, S.E.,M.M.

Drs. Samsiar Ismail, M.M, menjabat sebagai Direktur Umum tahun 2015. Drs. Sudirman HMY, M.M, menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2015. M. Faridhan, S.E.,M.M, menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan tahun 2015.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Aspidsus Siju, S.H.,M.H pada saat menggelar Konferensi Pers di Lantai 3 Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Rabu 16 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 Bank milik Pemerintah Daerah terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk dibangun Kantor Pusat dengan Total

Harga Perolehan sebesar Rp. 99.173.013.750 dengan luas tanah seluas 7.883 M²(persegi).

“Pada pelaksanaannya terdapat kelebihan pembayaran yang dihitung sebagai selisih berdasarkan bukti transfer pembelian tanah tersebut dengan yang diterima oleh pihak pemilik tanah bersertifikat Hak Milik lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000.000 yang saat ini telah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat saat itu.

Sebagaimana pertanggungjawabannya, para Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Red)*

Kapolres Ngada Cabuli 3 Anak di Bawah Umur dan Jual Video Pornonya Ke Situs Australia



AKBP Fajar Widyadharmas Lukman Sumaatmaja, Tersangka Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Dan Penyalahgunaan Narkotika

Jakarta, Exclusive News--- Polri resmi menetapkan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharmas Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, AKBP Fajar terbukti melakukan tindak pidana tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta.

“Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawah umur dan persetubuhan tanpa ikatan sah,” kata Trunoyudo saat konferensi pers di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Trunoyudo menyatakan bahwa AKBP Fajar terbukti melanggar kode etik kepolisian. Menurutnya, Polri tidak akan menoleransi tindakan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada itu. Bahkan kata dia, tindakan itu sudah masuk dalam perbuatan tercela dan pelanggaran berat.

“Tersangka juga merekam dan menyebarkan video asuilnya,” ucap jenderal bintang satu tersebut.

Dalam penetapan tersangka itu, sejumlah fakta baru terkait kasus tersebut pun terungkap. Trunoyudo mengungkapkan bahwa korban pencabulan oleh Eks Kapolres Ngada itu mencapai empat orang. Tiga diantaranya merupakan berusia anak sementara satu lainnya perempuan dewasa. “Anak satu berusia 6 tahun, anak dua berusia 13 tahun, anak tiga berusia 16 tahun, dan orang dewasa inisial SHDR berusia 20 tahun.” kata Truno.

Trunoyudo mengatakan jumlah korban pelecehan seksual ini terungkap dalam hasil pemeriksaan terhadap tersangka. AKBP Fajar bukan hanya mencabuli para korban, namun juga merekam dan menyebarkan videonya.

Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang membeberkan sejumlah bukti yang didapatkan dalam penyelidikan kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar.

Dalam prosesnya, Ditreskrim Polda NTT menemukan sejumlah barang bukti yang berhubungan dengan kasus itu. Mulai dari rekaman kamera pengawas, pakaian yang diduga milik korban, hingga dokumen pemesanan sebuah kamar hotel atas nama tersangka pada 11 Juni 2024 di Kupang.

Tak hanya itu, penyidik dari Polda NTT juga mengumpulkan barang bukti berupa hasil visum pelecehan seksual terhadap korban. Kemudian compact disc (CD) berisikan delapan rekaman video kekerasan seksual yang dibuat oleh AKBP Fajar.

“Barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video,” ucap Dirkrim Polda NTT Komisaris Patar Silalahi dalam konferensi pers itu.

Video kekerasan seksual ini tersebar di sebuah situs porno di Australia. Pihak otoritas Australia kemudian melaporkan video tersebut ke Mabes Polri.

Kasus ini mulai diselidiki oleh Polda NTT pada 23 Januari 2025. Pada 20 Februari 2025, Fajar diperiksa dan dibawa ke Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Penyidik menjerat Fajar dengan Pasal 6 huruf C dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Sehubungan dengan statusnya sebagai tersangka, AKBP Fajar kini ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri hingga proses penyidikan terhadap perkara tersebut selesai. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divisi Propam Polri, Agus Wijayanto juga menyebut Fajar sudah menjalani penahanan sejak 24 Februari 2025 lalu.

Selain itu, sidang pelanggaran etik kepolisian yang dilakukan Fajar juga akan dilakukan segera. "Ini kategori berat. Pasalnya berlapis. Divisi Propam Polri akan melaksanakan sidang etik yang direncanakan berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025," ujar Agus saat konferensi pers di ruang Divisi Humas Polri.

Meski penetapan tersangka AKBP Fajar dilakukan oleh Mabes Polri, namun penanganan kasus tindak pidana eks Kapolres Kupang itu umumnya akan ditangani oleh Polda NTT. Saat ini, Polda NTT juga sedang mendalami keterlibatan seorang perempuan berinisial "F" yang diduga berperan sebagai penyedia anak di bawah umur untuk AKBP Fajar.

"Kami mendalami dugaan bahwa wanita berinisial 'F' menerima imbalan sebesar Rp 3 juta dari AKBP Fajar untuk menyediakan anak di bawah umur," ujar Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga pada Jumat, 14 Maret 2025.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda NTT mengungkapkan bahwa korban berusia 6 tahun dipesan oleh tersangka melalui seorang perempuan berinisial F. Setelahnya F membawa korban ke hotel yang sebelumnya sudah dipesan Fajar.

Tim penyidik kemudian menemukan tanda pengenal, yakni fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) milik eks Kapolres Ngada tersebut di sebuah hotel. "Jadi tidak terbantahkan lagi, adanya fotokopi SIM di

resepsionis salah satu hotel tersebut, atas nama FWSL,” ujar Patar dalam jumpa pers di Polda NTT, Selasa sore, 11 Maret 2025.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Polri menyatakan tengah mendampingi korban asusila mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Pendampingan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas sosial unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) di Kupang, NTT.

“Antara lain dengan melakukan pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan hukum dan perlindungan serta pemeriksaan psikologi,” kata Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Nurul Azizah dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Kamis.

Atas kasus AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Polisi Nasional, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi jalannya penyelidikan terhadap Kapolres Ngada.

“Terkait dengan yang kasus Ngada, jadi silahkan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana,” ujar Budi Gunawan di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin, 3 Maret 2025.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mendesak agar Fajar segera dipecat dan dipidanakan dengan hukuman berat. Benny menilai, tindakan Fajar telah mencoreng institusi kepolisian.

Aktivis perempuan dan anak di NTT, Sarah Lery Mboeik, menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ada keadilan bagi korban. Dia pun mengajak pihak-pihak terkait untuk melindungi saksi dan korban dalam kasus ini.

“Kita kawal bersama, jangan sampai ada upaya mengintimidasi korban atau ada upaya berdamai dengan tujuan menghilangkan pidana,” kata Sarah.

Sarah juga mempertanyakan sistem rekrutmen Polri yang seharusnya bisa mendeteksi perilaku menyimpang seperti yang

dilakukan Fajar. Oleh karena itu, ke depan, sistem seleksi anggota Polri dinilai membutuhkan banyak perbaikan.

Aktivis kemanusiaan di NTT, Gabriel Goa, mengingatkan, kasus ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, dia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap perilaku anggota Polri serta reformasi dalam sistem rekrutmen dan pengawasan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menilai tindakan Kapolres Ngada ini sebagai bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius apalagi eksploitasi dan membuat konten untuk menghasilkan uang, dan ini artinya salah satu bentuk baru atau lain tindakan pidana perdagangan orang,” kata Ai Maryati Solihah.

Menurutnya, TPPO tidak hanya terbatas pada praktik jual beli manusia, tetapi juga mencakup tindakan seperti yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, yakni dengan mendistribusikan konten eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Oleh karena itu, dia menilai perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaku hanya mengunggah konten di situs tertentu di luar negeri atau memiliki jaringan khusus dalam pembuatan konten pelecehan seksual terhadap anak.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, juga mengecam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ini.

“Semua pihak perlu memastikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diaplikasi dengan optimal pada proses hukum kasus ini,” ujar dia. (*Red*)

Kasus Pencabulan Dan Penyalahgunaan Narkotika oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja Menambah Sejarah Kalam Sistem Rekrutmen Polri



AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Tersangka Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Dan Penyalahgunaan Narkotika

Jakarta, Exclusive News--- Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja adalah seorang perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Pria berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) ini tengah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak banyak informasi terkait latar belakang AKBP Fajar. Namun, sejumlah informasi terkait kegiatan kepolisian AKBP Fajar dibagikan melalui media sosial X SMA Taruna Nusantara @SMATN. Berdasarkan sejumlah unggahan akun tersebut, Fajar diketahui merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-9, yang lulus sekitar tahun 2001.

Melansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Fajar tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian. Karier Fajar meningkat saat dia dipercaya menjadi Kepala Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada 2019.

Tiga tahun di Jawa Barat, Fajar dimutasi ke Polda Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Sumba Timur pada 2022. Dua tahun kemudian, dia dimutasi untuk menjabat sebagai Kapolres Ngada di Flores, NTT, Juli 2024.

Saat menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Fajar memiliki harta kekayaan senilai Rp 127.299.958 atau Rp 127 juta. Hartanya ini terdiri dari sebuah mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp 100 juta dan harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp 27.299.958 atau Rp 27 juta.

Ketika menjadi Kapolres Sumba Timur pada 2022, hartanya berkurang dan hanya tersisa Rp 103 juta, yang terdiri dari mobil CRV senilai Rp 90 juta dan harta kas dan setara kas sebesar Rp 13 juta. Setahun kemudian, harta Fajar menurun drastis dan hanya menyisakan harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 14 juta, tanpa mobil.

Terbaru, Fajar ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri akibat terlibat dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur.

Tak hanya itu, penyidik dari Polda NTT juga mengumpulkan barang bukti berupa hasil visum pelecehan seksual terhadap korban. Kemudian compact disc (CD) berisikan delapan rekaman video kekerasan seksual yang dibuat oleh AKBP Fajar.

Video kekerasan seksual ini juga tersebar di sebuah situs porno di Australia. Pihak otoritas Australia kemudian melaporkan video tersebut ke Mabes Polri.

Menanggapi kabar tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan memastikan seluruh oknum yang terlibat kasus pidana maupun narkoba akan dihukum lebih berat dibandingkan masyarakat umum.

“Justru oknum terlibat sanksi hukum lebih berat karena disamping pengenaan hukum pidana narkoba, terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing entah itu oknum Polri dan TNI,” kata Budi.

Dia juga memastikan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Kapolres Ngada akan berjalan secara adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mendesak agar Fajar segera dipecat dan dipidanakan dengan hukuman berat. Benny menilai, tindakan Fajar telah mencoreng institusi kepolisian.

Aktivis perempuan dan anak di NTT, Sarah Lery Mboeik, mempertanyakan sistem rekrutmen Polri yang seharusnya bisa mendeteksi perilaku menyimpang seperti yang dilakukan Fajar. Oleh karena itu, ke depan, sistem seleksi anggota Polri dinilai membutuhkan banyak perbaikan.

Aktivis kemanusiaan di NTT, Gabriel Goa, mengingatkan, kasus ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, dia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap perilaku anggota Polri serta reformasi dalam sistem rekrutmen dan pengawasan.

Kasus pencabulan dan penyalahgunaan narkoba oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ini menambah sejarah kelam sistem rekrutmen Polri.

Dan tentunya isu-isu miring tentang sistem rekrutmen Polri yang syarat dengan Duitisasi dan Nepotisme yang selama ini berkembang di masyarakat menjadi terkonfirmasi sebagai pembenaran.

Meskipun ketika munculnya beberapa kasus, merupakan ulah segelintir oknum saja. Namun akan sulit dikatakan 'Oknum' jika pelakunya itu sudah terlalu banyak.

Untuk itu, Polri harus segera memperbaiki diri. Meski sepertinya sudah begitu terlambat karena oknum-oknum ini terdapat di jajaran paling rendah hingga tertinggi. Dan telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Bahkan sepertinya telah terwariskan dari generasi ke generasi.

Namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, demi keberlanjutan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. (Red)

Sanggau, Kalimantan Barat Tetap Aman dan Kondusif



Buka puasa bersama antara anggota Koramil 1204-08/Meliau dan Polsek Meliau, pada Jumat, 28 Maret 2025, di Rumah Makan Azima, Desa Meliau Hilir

Sanggau, Exclusive News--- Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Koramil 1204-08/Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hingga Jumat, 28 Maret 2025, dilaporkan tetap aman dan kondusif. Hal ini disampaikan dalam laporan perkembangan situasi yang diterima Dandim 1204/Sgu.

Laporan tersebut menyebutkan tidak terjadi bencana alam, konflik, maupun permasalahan sosial yang signifikan. Kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Hankam) dilaporkan nihil.

Meskipun demikian, kegiatan teritorial tetap berjalan. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah buka bersama antara anggota Koramil 1204-08/Meliau dan Polsek Meliau pada pukul 17.00 – 18.48 WIB di Rumah Makan Azima, Desa Meliau Hilir.

Kegiatan ini diikuti oleh Danramil Peltu Jamal Setyono dan tujuh anggota Koramil. Kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan lain seperti Puanter, Wanwil, dan Bakti dilaporkan nihil. Begitu pula dengan program unggulan Kasad terkait stunting, Oplah, Kampung Pancasila, dan lahan TNI tanam padi/jagung.

Keberhasilan menjaga Kamtibmas di Meliau merupakan hasil kerja keras aparat keamanan dan sinergi positif antara TNI dan Polri. Kerjasama ini diharapkan dapat terus dipertahankan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (*Red*)

Pemuda Pancasila, Tomas, Toga beserta Elemen Masyarakat Bagikan Takjil



Pemuda Pancasila, Tomas, Toga beserta Elemen Masyarakat bagikan Takjil di Simpang Empat Jl. Sudirman, Sanggau

Sanggau, Exclusive News--- Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau bersama elemen Masyarakat Peduli Sanggau Maju mengeluarkan pernyataan sikap mendukung revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pernyataan sikap tersebut, Pemuda Pancasila Sanggau menegaskan empat poin penting, yaitu:

1. Mendukung sepenuhnya revisi UU TNI yang telah ditetapkan oleh DPR.
2. Menolak sifat anarkis dan arogansi terhadap penolakan revisi UU TNI.

3. Menjunjung tinggi demokrasi yang sedang berjalan di tanah air.
4. Mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Sanggau, Ir. John Hendri, mengatakan bahwa Pemuda Pancasila Sanggau akan selalu mendukung keputusan pemerintah.

“Bagi kawan-kawan yang menolak, silakan sampaikan dengan bijak, janganlah anarkis yang akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Usai mengeluarkan pernyataan sikap, MPC Pemuda Pancasila Sanggau juga melakukan bakti sosial dengan membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Simpang Empat Jl. Sudirman, Sanggau.

Dengan demikian, Pemuda Pancasila Sanggau bersama Tomas, Toga bersama Elemen Masyarakat menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keharmonisan masyarakat. *(Red)*

Buka Bersama Forkopimda Sanggau, Kodim 1204/Sgu dan Polres Sanggau



Buka puasa bersama Forkopimda Sanggau bertempat di Caffe Kingpool Jl. H. Juanda Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau

Sanggau, Exclusive News---Sebagai bentuk sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Sanggau, juga sebagai bentuk kekompakan dalam menjaga keamanan bersama, maka pada Hari Kamis, 27 Maret 2025, Pukul 17:00 WIB, bertempat di Caffe Kingpool Jl. H. Juanda Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, telah dilaksanakan buka puasa bersama Forkopimda Kabupaten Sanggau.

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena, S.Sos, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Subandi, S.E., M.I.P., Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau yang diwakili Kasi Pidum Bilal Bimantara S.H., M.H., Waka Polres Sanggau Kompol Yafet Efraim Patabang S.H., S.IK, para PJU dan Staf Polres Sanggau, para Pasi dan Staf Kodim 1204/Sanggau, dan Danki Brimob Kompi 3 Sanggau IPDA Flayianus Hengki S.E.

Kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan oleh Kodim 1204/Sanggau dalam rangka memperingat Sinergitas TNI-POLRI serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Pada pukul 18:40 WIB, kegiatan Buka Puasa Bersama Forkopimda selesai dilaksanakan dengan aman dan lancar. *(Red)*

Wakil Bupati Sanggau Sidak Ketersediaan Obat dan Stabilitas Harga



Wabup Sanggau, Susana Herpena saat melakukan sidak di pasar tradisional di Kecamatan Meliau

Sanggau, Exclusive News--- Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pasar tradisional di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 18 Maret 2025.

Sidak ini dilakukan bersama Anggota DPRD dan Camat Meliau untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, khususnya di Puskesmas Kecamatan Meliau.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan program 100 kerja berjalan sesuai dengan visi dan misi serta memastikan pelayanan publik

berjalan optimal, terutama dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Dalam kunjungan ke puskesmas, Wakil Bupati memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan hadir sesuai jam kerja. Namun, saat berdialog dengan salah satu dokter yang bertugas, ditemukan adanya kendala dalam ketersediaan obat-obatan yang biasanya disuplai oleh Dinas Kesehatan.

“Ini menjadi catatan permasalahan serius dalam hal ketersediaan obat-obatan. Jika tidak segera diatasi, dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas,” tegas Susana Herpena.

Selanjutnya, ia juga melakukan sidak ke pasar tradisional guna memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Hal ini penting untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Lebaran.

“Kami ingin melihat langsung kondisi pasar, bukan hanya mendengar laporan. Sejauh ini harga bahan pokok masih stabil, termasuk beras, daging sapi, dan daging ayam. Stoknya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran nanti,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun harga cabai mengalami sedikit fluktuasi akibat terganggunya pasokan dari wilayah Ambawang yang dilanda banjir, namun tidak ditemukan lonjakan harga yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah belum melihat urgensi untuk melakukan intervensi terhadap harga bahan pokok.

Susana mengungkapkan, pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

“Kami berharap masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan ini,” tutupnya. *(Red)*

EXCLUSIVE NEWS

BERKATA DENGAN FAKTA

Tomi, S.Pd.,M.E.



Catatan Kalam
APIP



Volume 2 Nomor 03, Maret 2025

EXCLUSIVE NEWS

BERKATA DENGAN FAKTA



ASAL MULA NAMA KOTA NGABANG KABUPATEN LANDAK



ISSN 3089-3275

mi, S.Pd.,M.E.



9

773089

327009